

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas terhadap Pemerintah Daerah dan membuka wacana baru tentang pengelolaan pemerintahan di daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangannya.

Seiring perubahan tersebut, perkembangan situasi sekarang ditandai dengan dominasi informasi dan teknologi di bidang informasi. Perusahaan-perusahaan berlomba menggunakan teknologi tersebut untuk lebih meningkatkan performa perusahaannya. Dalam era globalisasi ini persaingan di antara organisasi bisnis terjadi baik dengan sesama perusahaannya yang berasal dari suatu Negara maupun dari perusahaan dari Negara lain. Kenyataan tersebut mendorong semua perusahaan yang ingin tetap eksis dan unggul dalam persaingan mengembangkan infrastrukturnya secara optimal. Dalam hal ini teknologi informasi berperan baik sebagai pemicu ketatnya persaingan maupun sebagai alat untuk bersaing. Tidak ketinggalan di sektor publik, masyarakat semakin menuntut pemerintah untuk lebih akuntabel, transparansi, dalam penyelenggaraan, pemerintahannya. Untuk lebih mengetahui peranan sistem informasi keuangan pemerintah

daerah tentunya perlu diketahui tentang alasan strategis bagi pemerintah untuk memilikinya antara lain :

1. Semakin kompleknya aktifitas dari pemerintah daerah dan pusat dalam menjalankan roda pemerintahan. Informasi menjadi dasar pengambilan keputusan agar akurat, tepat sasaran, dan tidak ketinggalan jaman.
2. Semakin kritisnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat semakin menuntut agar pemerintah semakin efektif dan efisien.
3. Para infestor dan kreditor baik luar maupun dalam negeri menuntut adanya informasi yang jelas tentang kedaan daerah yang akan dijadikan penanaman infestasinya.

Sistem informasi *“information system (IS) can be defined as a set interrelated components working together to collect, retrieve, process, strore, and disseminate information for the purpose of facilitating planning, control, coordination, and decision making in bussines and other organizations”*(Laudan, 1998).

Dari definisi diatas bisar ditarik kesimpulan bahwa aktifitas dari suatu sistem informasi meliputi : Mendapatkan dan menerima data sebagai infud, mengelola dan menerima data tersebut, serta menghasilkan informasi bagi mereka yang membutuhkan. Sistem informasi mempunyai siklus kegiatan sebagai berikut :

1. Analisis yaitu menganalisis masalah informasi yang dihadapi oleh suatu perusahaan atau organisasi dan mengetahui kekurang-kekurangan dalam sistem yang sedang berlaku untuk menyesuaikan sistem sesuai dengan kebutuhan.
2. Rancangan (desigen) yaitu kegiatan menyusun sistem baru atau kegiatan mengubah sistem lama.
3. Diplementasi, yaitu penerapan sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama.
4. Follo up, yaitu kegiatan mengawasi pelaksanaan sistem baru untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam sistem baru dan kemudian menevaluasi (Baridwan 1993).

Informasi merupakan peran yang sangat penting untuk mengetahui kegiatan apa yang telah terjadi, melakukan evaluasi apakah kegiatan tersebut yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan menjamin agar data tersebut dapat diolah secara efisien menjadi informasi yang akurat, dapat dipercaya, dan tepat waktu maka dalam pengolahan data tersebut diperlukan suatu alat yang dinamakan Sistem informasi. Menurut (Bodnar 2000) informasi adalah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat.

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan di Daerah mempunyai dasar penyelenggaraan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Antara pemerintahan Pusat dan Daerah yang berbunyi:
1. Pemerintah Pusat menyelenggarakan suatu sistem Informasi Keuangan daerah.
 2. Informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data terbuka yang dapat diketahui masyarakat.
 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- b. Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2000 tentang Informasi Keuangan Daerah.
- c. Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 perihal organisasi dan tata kerja Departemen Keuangan memutuskan bahwa untuk melaksanakan SIKD dibentuk suatu Pusat Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah (PPSIKD) dibawah koordinasi Badan Informasi dan Teknologi Keuangan (BINTEK-Keuangan) dengan tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah. Disamping itu dalam surat keputusan yang sama juga dibentuk Direktorat Jendral Pertimbangan Keuangan Daerah Pusat dan Daerah

(DJ-PKPD) dengan tugas utama membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah.

Menurut Inpres Nomor 4 Tahun 2011, BPKP, dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, *efisien, effective, transparans, akuntabel, dan auditabel*. Dengan demikian maka Pemerintah Daerah yang merupakan etitas pelaporan dapat menyajikan Laporan Keuangan secara wajar, transparan dan akuntabel.

Laporan Keuangan merupakan media bagi sebuah etitas dalam hal ini pemerintah mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik.

Pemerintah harus mampu menyajikan Laporan Keuangan yang mengandung informasi Keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik yakni : Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintahan No.71 Tahun 2010).

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pemakai laporan agar dapat membantu menterjemahkan aktivitas ekonomi suatu pemerintahan, oleh karena itu laporan keuangan menjadi perhatian bagi penggunaannya untuk mengambil keputusan. Seiring dengan penggunaan dari laporan keuangan tersebut maka laporan keuangan harus disajikan

dengan benar yang sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku. (Munawir 1991) Pengertian laporan keuangan menurut Munawir pada dasarnya laporan keuangan adalah proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan.

Dimulai dengan Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian diperjelaskan dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta diarahkan pelaksanaannya dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun anggaran berikutnya.

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari keterpaduan dan sinergisitas seluruh elemen perangkat daerah yang ada di dalamnya. Dukungan dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh pihak pemerintah pusat ke pemerintah daerah pun menjadi faktor penting keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Salah satu langkah pendukung yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah memberikan kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang No. 12 Tahun 2008 maka berbagai kelemahan dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran pembangunan daerah diharapkan dapat disempurnakan. Otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberi kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur

urusan rumah tangga daerah, menetapkan kebijakan, serta melakukan pembiayaan dan pertanggung jawaban keuangan sendiri.

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan Keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam peraturan pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010. Laporan Keuangan Pemerintah dihasilkan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah. Tujuan Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah menurut kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan, pelaporan keuangan pemerintahan daerah (pemda) seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik bagi keputusan ekonomi, social, mau politik dengan. Beberapa peraturan perundang-undangan menyebutkan mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 99 ayat (2), yang berbunyi:“penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya”. Pemerintah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal.

Keberhasilan suatu sistem informasi juga bergantung pada kualitas sistem dan pemanfaatan sistem tersebut oleh pemakai sistem karena teknologi sistem informasi diselenggarakan dalam suatu organisasi untuk membantu mereka dalam menyelesaikan tugasnya.

Tidak jarang ditemukan bahwa teknologi yang diterapkan dalam sistem informasi sering tidak tepat atau tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pemakai sistem sehingga penerapan sistem informasi kurang memberikan manfaat atau bahkan tidak memberikan manfaat sama sekali dalam peningkatan kinerja individu. Apabila kinerja setiap individu dapat dimaksimalkan maka akan berpengaruh pada kinerja instansi secara keseluruhan. Untuk memperoleh kualitas informasi yang baik, maka dibutuhkan sistem aplikasi yang baik pula untuk dapat mengolah data menjadi informasi yang berguna. Selanjutnya, untuk mendapatkan sistem aplikasi yang baik, organisasi harus menggunakan sistem aplikasi dari pemberi jasa yang berkompeten dalam pembuatan sistem aplikasi yang dibutuhkan organisasi, yang dapat memuaskan kepentingan penggunanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mengungkapkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD/APBN, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Hal ini juga diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan kemudian direvisi menjadi Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah

berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan keuangan.

Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah maka setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan. Hal ini bertujuan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilaksanakan secara manual atau melalui aplikasi komputer. Oleh sebab itu, keandalan sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sangat berhubungan erat dengan tingkat keandalan pelaporan keuangan. Kinerja atas laporan keuangan akan dinilai baik apabila dalam penyusunan laporan keuangan seluruh akun disajikan dan disusun secara jujur, benar dan teliti yang didukung oleh bukti-bukti yang jelas dan lengkap. Oleh sebab itu untuk mengurangi ketidak telitian dan menghindari kesalahan dalam penyusunan laporan keuangannya maka diperlukan suatu sistem yang dapat mendukung pencapaian tersebut yaitu penerapan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga sistem akuntansi pemerintah perlu memanfaatkan semua jenis informasi dan teknologi agar efektifitas dan efisiensi penyusunan laporan keuangannya dapat tercapai.

Penggunaan SIPKD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewah Yogyakarta sesuai dengan kemajuan teknologi dan informasi maka diterapkan aplikasi dalam rangka mempercepat transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewah Yogyakarta merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas, Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
4. Pembinaan dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah
5. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Hasil menelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan hal ini ditunjukkan oleh;

Yosefriandi 2013, Indriasari 2008, Harifan 2009 dan menemukan bahwa adanya bukti yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hubungannya positif.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis bermaksud meneliti dan menguji apakah dalam penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menulis rumusan masalah sebagai berikut : peneliti bermaksud untuk menguji apakah penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yogyakarta?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penulis akan membatasi masalah terhadap topik yang akan dikaji. Penulis hanya memfokuskan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yogyakarta, yang dimana terdapat

kajian 5 Dimensi dari variabel SIPKD yaitu kualitas data input, kompetensi SDM, dukungan manajemen puncak, persepsi keberhasilan system, dan implementasi SIPKD, serta berdasarkan 4 dimensi dari variabel LKPD yaitu dapat dipahami, relevan, handal, dan dapat dibandingkan. Yang akan dituju pada bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan pengelola akuntansi. Hal tersebut dikarenakan topik yang diambil oleh penulis adalah mengenai pengaruh penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang memberikan pengaruh atau malah sebaliknya pada kualitas laporan keuangan.

D. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang dilakukan penulisan adalah untuk mengetahui adanya pengaruh antara penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap: Pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi, khususnya terkait dengan penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan semoga bermanfaat bagi sebagai referensi untuk ke depannya dan dapat digunakan sebagai

perbandingan dengan penelitian yang sama atau sejenis di masa yang akan datang.

3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Agar dapat mengevaluasi penerapan sistem informasi pengelolaan daerah (SIPKD) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

F. Kerangka Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi yang mengenai materi serta hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab, adapun sistematika penulisan penelitian ini yakni sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab satu ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab dua ini menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar dari analisis penelitian, hasil penelitian sebelumnya, tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab tiga ini menjelaskan mengenai Metode penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab empat ini menjelaskan mengenai gambaran umum penelitian, analisi data dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Pada bab lima atau bab terakhir ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari seluruh penelitian yang dilakukan dan juga saran-saran atau implikasi serta keterbatasan.